

Permasalahan hukum upaya pengalihan hak atas rumah negara bagi pensiunan pegawai negeri sipil : studi kasus Putusan PTUN nomor: 173/G/2008/PTUN.JKT = Legal issue of transfer of right over official residence for retired civil servant: case study No. 173/G/2008/PTUN.JKT

Avie Sekar Lantri Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431349&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hak Pensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansi pemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salah satunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan? pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajiban menetapkan status rumah negara yang bersangkutan yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Instansi pemilik barang tersebut kemudian menimbulkan kerugian yang besar bagi penghuni rumah negara yang berimbas pada masalah keabsahan status mereka sebagai penghuni yang sah. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya upaya pihak pemilik barang yang menghalang-halangi pemenuhan hak dari penghuni yang berstatus sebagai pensiunan. Penulis meneliti pendapat hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut terkait adanya masalah pemenuhan hak pensiunan pegawai negeri dalam melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara.

ABSTRACT

This thesis examines regarding legal issue of fulfilling the right of retired civil servants to make an endeavour on transfer of right over official residence bt the Government Institution as the owner. This issue was actually shown in one of state administration case regarding the transfer of right over official residence located in ?Komplek Pajak Kemanggisan? and had been decided in verdict No. 173/G/2008/PTUN.JKT. The issue was generally caused by disobedience act of Government Institution on performing an obligation to establish the status of the official residence which had already been regulated in the the prevailing regulation. Later, the Disobedience of the Government Institution caused a huge loss for the residents dnd has led on the issue of the validity of their status as a legitimate residents. In this research, writer found the existence of precluding action from the Government in fulfilling the right of the retiree as the residents. Writer examines the legal opinion of the Tribunal Judge in the verdict regarding the issue on the transfer of right over official residence.